

Enam Bulan Tuntaskan Aset

PONTIANAK - Pemprov mematok target enam bulan untuk menuntaskan masalah aset. Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie berharap masalah yang menjadi temuan BPK itu dapat disele-

saikan pada Desember 2012 nanti. Untuk mewujudkan ini, menurutnya perlu komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

M Zeet juga berharap eksekutif dan legislatif tidak

lagi bertengkar tentang perlu tidaknya pembentukan Pansus Aset. "Jangan lagi kita ribut soal begitu," ujarnya saat dijumpai usai rapat tertutup pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, Jumat (27/7).

Eksekutif berharap pihak legislatif dapat mendukung langkah penyelesaian masalah sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai rekomendasi BPK dan aturan, DPRD dapat membentuk Panja (panitia kerja) untuk menindaklanjuti temuan BPK. "Dalam tatib dewan kan sudah jelas, mereka bisa bentuk panja. Itu yang diharapkan dari eksekutif," kata M Zeet.

Seperti diberitakan, BPK menemukan adanya aset pemprov yang belum tercatat. Aset itu misalnya aset tetap tanah Rp92,2 miliar, termasuk tanah belum bersertifikat (atas nama pemprov) 87.302.133,26 M2 senilai Rp53,2 miliar, aset tetap peralatan dan mesin Rp2,8 miliar, aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Rp390,9 miliar dan aset tetap lainnya Rp5,2 miliar.

Menurut M Zeet, pembentukan Pansus untuk menyelesaikan masalah aset dianggap kurang cocok.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Enam Bulan Tuntaskan Aset

Sambungan dari halaman 16

Ia khawatir Pansus tidak akan efektif dan hanya menghabiskan waktu karena lebih banyak diisi dengan rapat. Padahal, penyelesaian masalah aset ini menyangkut aspek administratif yang memerlukan action lebih banyak.

"Kalau mau cepat, kita langsung action saja. Kita kumpulkan data, masukkan standar akuntansi pemerintahan, buat report, lalu konsultasikan ke BPK. Inventarisasi, terus bolak-balik begitu," ujarnya. Meskipun tanpa Pansus, DPRD tetap dapat berperan aktif antara lain dengan melakukan kontrol terhadap kinerja tim eksekutif dan dengan mendukung sisi

penganggaran.

"Kalau kita butuh anggaran, kasih. DPRD juga bisa kontrol. Kalau kita perlu bentuk tim untuk menyelesaikan ini dari pihak luar, DPRD juga bisa dukung biayanya. Jangan lagi kita ribut. Mari kita rampungkan semua," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, sejauh ini memang masih ada perdebatan di antara eksekutif dan legislatif terkait pembentukan Pansus atau Panja untuk menyikapi temuan BPK. Namun ia yakin dalam waktu dekat, perbedaan pandangan ini akan berakhir.

Prabasa menerangkan bahwa Pansus Aset sebetulnya sudah sejak awal diusulkan oleh

21 anggota DPRD. Bahkan, usul itu sempat diagendakan untuk sidang paripurna yang kemudian batal akibat tidak kuorum. Namun, sudah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bahwa sidang paripurna itu akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah.

"Nanti dijadwalkan lagi. Ini sudah mau paripurna. Jadi kalau pun mau dibatalkan, harus lewat paripurna juga," katanya. Rencana pembentukan Pansus Aset tersebut menurutnya terpisah dengan masalah LHP BPK 2011. Menyikapi LHP BPK itu, sebagian anggota DPRD dan eksekutif merasa cukup menindaklanjutinya dengan Panja, bukan Pansus. (ron)